

ANALISA REVALUASI VALUTA ASING DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA-DAERAH (UAKBUN-D)

Dokman Marulitua Situmorang^{*1}, Amin As'adi²

¹Program Studi Kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Kristen Bukit Pengharapan,

²Program Studi Akuntansi Universitas Terbuka

¹van.stmng1985@gmail.com, ²aminsyamhudi@gmail.com

Abstract

This study aims to provide an overview of the foreign exchange revaluation process in the preparation of financial statements of the State-Regional General Treasurer (UAKBUN-D) at KPPN Jakarta III. The foreign currency revaluation process at the KPPN is carried out every quarter starting when the preparation of the semester I financial statements. Post revaluation includes cash accounts in the KPPN cash in the treasury for foreign currency expenditures, and debt to third parties (returns) on the KPPN balance sheet. The foreign exchange revaluation process is carried out using an application assistance, namely the State Treasury and Budget System (SPAN) in the General Ledger (GL) module which is held by the verification and accounting section (Vera). This research uses descriptive qualitative research methods. The result of this research is that foreign exchange revaluation at KPPN Jakarta III is carried out in order to translate monetary assets in foreign currency into rupiah as reporting currency so that it can be presented reliably in the Financial Statements of UAKBUN-D KPPN Jakarta III. The process of the revaluation process is carried out using the assistance of the SPAN application at 3 posts, namely, Cash at the KPPN, Cash in the Expenditure Treasurer and Debt to Third Parties.

Keywords: Revaluation, Foreign Exchange, Financial Reports

1. Pendahuluan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah salah satu Departemen/Lembaga Pemerintahan yang mengatur Pendapatan Negara dan Pengeluaran Negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah salah satu Pendapatan Negara yang diatur pengelolaannya hingga masuk ke kas negara (Amallia, 2015).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III merupakan salah satu unit vertikal di bawah ditjen perbendaharaan negara, Kanwil DJPB provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara – Daerah (UAKBUN-D). KPPN Jakarta III termasuk salah satu KPPN yang melayani kantor perwakilan di berbagai negara yang melakukan transaksi dalam valuta asing yaitu Kantor Atase pendidikan di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan (Bagian Anggaran 023). Berdasarkan Peraturan pemerintah nomor PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 01 dinyatakan bahwa transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam mendukung proses revaluasi tersebut direktorat jenderal

perbendaharaan menerbitkan perdirjen nomor PER-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara dan surat yang diterbitkan oleh direktur akuntansi dan pelaporan keuangan nomor S-3467/PB.6/2017 tanggal 6 april 2017 hal kebijakan penyajian akun kas di bendahara pengeluaran dalam mata uang asing. Ketentuan tersebut mewajibkan KPPN yang mempunyai mitra satuan kerja dengan transaksi valuta asing untuk melakukan revaluasi kas di KPPN, Kas di bendahara pengeluaran dan Utang kepada pihak ketiga (retur) dalam penyusunan laporan keuangan UAKBUN-D khususnya pada laporan keuangan Semester I, Triwulan III dan Tahunan Unaudited.

Proses revaluasi valuta asing dilakukan oleh seksi verifikasi dan akuntansi (seksi vera) sebagai penanggungjawab penyusun laporan keuangan LKUAKBUN-D. Penyusunan Laporan keuangan bersumber pada data yang diolah melalui sistem yaitu Sistem perbendaharaan dan anggaran negara (SPAN) khususnya pada modul General Ledger yang dipakai oleh seksi vera. Adapun proses revaluasi dilakukan juga menggunakan aplikasi SPAN oleh operator modul GL pada seksi vera. Posisi penting kurs valuta asing dalam perdagangan internasional mengakibatkan berbagai konsep yang berkaitan dengan kurs valuta asing mengalami perkembangan dalam upaya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing (Gultom & Soelehan, 2019).

Setiap bulan KPPN membuat laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dalam tingkat kuasa BUN. LKPP BUN inilah yang nantinya akan menjadi laporan keuangan RI (Arinie Hembarwati, 2017). Menurut Zulfah et al., (2017) Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang relevan, andal dan dapat dipercaya berkenaan dengan posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisas (Heban, M, & Thahir, 2020)

Revaluasi valas ini hanya dijumpai di KPPN Lingkup Kanwil DJPB provinsi DKI Jakarta dan menjadi hal yang unik dan menarik untuk dibahas karena prosesnya yang cukup rumit dan memerlukan ketelitian yang tinggi agar dapat menyajikan laporan keuangan UAKBUN-D yang berkualitas, oleh karena itu penulis menilai bahwa pembahasan ini menarik untuk dibahas dalam karya ilmiah akuntansi ini.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran proses revaluasi valuta asing dalam penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) pada KPPN Jakarta III agar dapat dipahami lebih luas.

2. Landasan Teori

Valuta Asing adalah mata uang luar negeri seperti dolar Amerika, Pounsterling Inggris, Ringgit Malaysia dan mata uang asing di luar Rupiah. Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devias. (Sulhan, 2011).

Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. (Jessica P. S. Selly E. M, 2019). Bursa valuta asing adalah transaksi jual-beli satu jenis mata-uang dengan mata-uang lainnya. (Nuryana, 2015).

Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik (negara perusahaan tersebut) dengan nilai mata uang negara lainnya. Risiko ini juga dikenal sebagai risiko mata uang (currency risk) atau risiko nilai tukar (*exchange rate risk*). (Farida & Darmawan, 2017).

Laporan keuangan merupakan catatan seluruh informasi keuangan perusahaan yang merupakan rekaman dari seluruh aktivitas manajer atas pengelolaan perusahaan (Ariefiara & Yanthi, 2017). Agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang diinginkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan harus memenuhi prasyarat normative yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Oflagi, Manossoh, & Walandouw, 2018)

Revaluasi valuta asing adalah proses yang dilakukan dalam rangka menjabarkan transaksi yang dilakukan dalam mata uang asing ke dalam mata uang rupiah sebagai mata uang pelaporan dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun, 2012) nomor 1 yang menyatakan bahwa “Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”. Revaluasi valuta asing dilakukan pada tiga pos neraca yaitu:

1. Kas KPPN
2. Kas di Bendahara Pengeluaran Valuta Asing
3. Utang Kepada Pihak Ketiga (retur).

Dasar hukum pelaksanaan Revaluasi Valuta asing adalah dengan ber pedoman dengan Per-19/PB/2016 Perlakuan Akuntansi Atas Selisih Kurs pada Rekening Milik Bendahara Umum Negara, S-3467/PB.6/2017 Kebijakan Penyajian Akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Mata Uang Asing , dan S-195/PB.6/2018 Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs atas Utang kepada Pihak Ketiga Retur SP2D dalam Mata Uang Asing pada KPPN. Proses revaluasi dilakukan menggunakan bantuan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada modul Geral Ledger & Accountig (Modul GL) yang dipegang perannya oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dalam rangka mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual. SPAN terdiri dari enam modul dan salahsatunya adalah Modul Akuntansi dan Pelaporan (*General Ledger & Accounting*).

Aplikasi SPAN dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) bekerja sama dengan Ditjen Anggaran dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada proses bisnis pada beberapa negara maju yang telah berhasil menerapkan program sejenis.

Pengertian Laporan Keuangan UAKBUN-D

Sistem akuntansi Pemerintah Pusat berdasarkan 213/PMK.05/2013 tentang Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari SABUN (sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan SAI (Sistem Akuntansi Instansi). Salah satu bagian dari sabun adalah SiAP (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat) yaitu “serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN”. Pihak yang mengelola SiAP dalam hal ini adalah KPPN selaku UAKBUN-D, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN Kanwil, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAKBUN-Pusat;

dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku UAPBUN AP.

Lapaporan keuangan disusun secara berjenjang mulai dari level KPPN sebagai UAKBUN-D yaitu Laporan Keuangan UAKBUN-D hingga pada level UAKBUN-Pusat yaitu Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Laporan Keuangan UAKBUN-D terdiri dari 3 komponen utama yaitu:

- a. Laporan Arus Kas (LAK)
- b. Neraca
- c. Calk.

Laporan Keuangan UAKBUN-D disusun dengan berpedoman pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 13 Juli 2017 hal: Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN- Kanwil.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan alat analisisnya adalah statistik deskriptif kualitatif yang merupakan analisis mencari kebenaran secara data-data yang akurat sehingga menemukan masalah dan solusi yang akan di rekomendasikan didalam penelitian (Situmorang & Hapsari, 2019). Metode ini dipilih karena ingin menggambarkan bagaimana proses pelaksanaan proses revaluasi valuta asing dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara – Daerah khususnya pada KPPN Jakarta III agar dapat dipahami lebih luas bagaiman praktek di lapangan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan post valuta asing. Tujuan Penelitian deskriptif adalah “mengetahui apa yang dikerjakan oleh orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan”. (Aslichati lilik, H.I Bambang Prasetyo, 2011)

Metode pengambilan data dilakukan dengan cara primer dan sekunder, data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber objek penelitian sedangkan data sekunder melalui perantara sehingga terlebih dahulu diolah atau analisis pihak lain (Dokman Marulitua Situmorang, 2019). Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah dengan terlibat secara langsung dalam proses revaluasi valuta asing yang dilakukan oleh KPPN Jakarta III dalam penyusunan laporan keuangan Triwulan III tahun 2020. Berdasarkan data di lapangan revaluasi valuta asing dilakukan pada post akun kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Atase Pendidikan perwakilan dari 17 Negara dan 1 Satuan Kerja KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS yang memiliki kas di bendahara pengeluaran (uang persediaan) dalam bentuk valuta asing, dan Utang pada pihak ketiga (*retur*).

4. Hasil Dan Pembahasan

Proses revaluasi valuta asing dalam penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) pada KPPN Jakarta III. Proses Revaluasi Valuta Asing

Proses revaluasi valuta asing pada KPPN Jakarta III dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- Tahap Persiapan
- Pelaksanaan Revaluasi
- Pengujian Hasil Revaluasi

1. Tahap Persiapan

Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah tahap persiapan. Tahapan ini sangat penting karena akan mempengaruhi kebenaran data hasil revaluasi.

Langkah pertama dalam proses persiapan adalah pengecekan untuk memastikan bahwa semua Bank Account Transaction (BAT) telah terposting setelah seksi bank melakukan rekonsiliasi rekening koran. Kemudian membandingkan saldo kas KPPN pada neraca dengan rekening koran dan Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN (Buku Putih). Jika terdapat selisih maka KPPN Jakarta III memastikan bahwa selisih tersebut merupakan pembulan yang berasal dari selisih kurs. Ini dilakukan karena kas KPPN adalah salah satu Komponen yang akan dilakukan revaluasi.

Langkah kedua, memastikan bahwa tidak ada lagi transaksi penerimaan yang berpengaruh pada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Valas yang disetorkan menggunakan mata uang rupiah. Jika terdapat transaksi penerimaan tersebut maka, KPPN Jakarta III melakukan normalisasi terlebih dahulu. Normalisasi dilakukan dengan mengkonversi setoran UP/TUP dalam mata uang rupiah pada satker dengan UP/TUP valuta asing ke dalam satuan mata uang USD.

Langkah ketiga, melakukan rekonsiliasi valuta asing internal dengan seksi pencairan dana dan rekonsiliasi valuta asing eksternal dengan satuan kerja terkait. Adapun berdasarkan rekonsiliasi tersebut didapatkan data sebagai berikut: Menguraikan hasil dari pengolahan data dan membahas hasil temuan secara deskriptif serta menjelaskan hasil pengujian atas hipotesis bila ada, pembahasan perlu mengkaitkan dengan teori dan kajian literature sebelumnya. Tabel yang disajikan bukan sekedar hasil output laporna keuangan, namun telah mengalami proses suntingan oleh penulis.

Tabel 1. Hasil rekonsiliasi menunjukkan data saldo kas di bendahara pengeluaran (USD) sama.

SATKER	NAMA SATUAN KERJA	AKUN	SALDO MENURUT GL SPAN (USD)	SALDO MENURUT PENCAIRAN DANA	SALDO MENURUT SATUAN KERJA
414593	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI TOKYO	111611	208.923,50	208.923,50	208.923,50
414607	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI WASHINGTON DC	111611	122.422,60	122.422,60	122.422,60
414613	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CANBERRA	111611	95.181,22	95.181,22	95.181,22
414622	KANTOR ATASE	111611	215.880,72	215.880,72	215.880,72

	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BANGKOK				
414638	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DEN HAAG	111611	251.298,60	251.298,60	251.298,60
414644	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI KUALA LUMPUR	111611	1.343.634,53	1.343.634,53	1.343.634,53
414650	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BERLIN	111611	159.333,92	159.333,92	159.333,92
414669	KANTOR DUBES / WRI UNESCO PARIS DI PARIS	111611	167.036,17	167.036,17	167.036,17
414681	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI CAIRO	111611	171.313,50	171.313,50	171.313,50
414690	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PARIS	111611	93.811,77	93.811,77	93.811,77
503121	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI LONDON	111611	149.176,37	149.176,37	149.176,37
503135	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI PORT MORESBY	111611	46.782,34	46.782,34	46.782,34
503142	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI MANILA	111611	145.044,86	145.044,86	145.044,86
503143	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI DILI	111611	112.696,50	112.696,50	112.696,50
512684	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI RIYADH	111611	644.944,58	644.944,58	644.944,58
681816	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI BEIJING	111611	75.272,42	75.272,42	75.272,42
681820	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI NEW DELHI	111611	61.080,40	61.080,40	61.080,40
690349	KANTOR ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KBRI SINGAPURA	111611	153.477,70	153.477,70	153.477,70

Sumber : data primer (diolah)

Langkah keempat, Jika terdapat akun 423943, 425753 dan 581611 pada satuan kerja Kuasa BUN maka dilakukan reklasifikasi terlebih dahulu ke akun 212191 (Utang kepada Pihak Ketiga).

2. Pelaksanaan Revaluasi

Pelaksanaan revaluasi dilakukan menggunakan aplikasi SPAN melalui modul GL Vera User yang menjadi kewenangan staff pada Seksi verifikasi dan Akuntansi. Sebelum memulai proses revaluasi staf seksi Verifikasi dan Akuntansi terlebih dahulu menarik data neraca lajur detail tambahan per satker sebelum revaluasi, ini dilakukan agar kita dapat mengetahui perubahan dari proses revaluasi yang dilakukan. Kemudian membuat perhitungan manual berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Dalam penelitian ini tanggal yang kita gunakan adalah tanggal 30 September 2020. Adapun langkah – langkah dalam proses revaluasi menggunakan aplikasi SPAN adalah sebagai berikut

a. Revaluasi Kas di KPPN

Revaluasi Kas di KPPN dilakukan melalui menu GL Vera User dengan mengirimkan permintaan → Program- Revaluasi Saldo → kemudian parameter revaluasi diisi dengan data sebagai berikut:

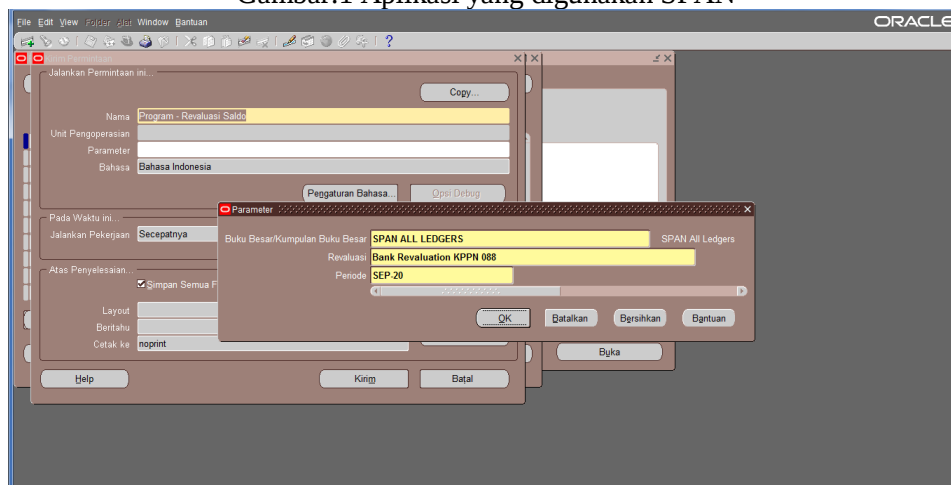
Buku Besar : SPAN All Ledger

Revaluasi : Bank Revaluation

Periode Revaluasi : September 2020

Kemudian Ok dan Kirim.

Gambar.1 Aplikasi yang digunakan SPAN



Proses ini akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Dr Kas Di KPPN xxx

Cr Selisih Kurs xxx

(jika saldo Kas di KPPN bernilai negatif)

Dr Selisih Kurs xxx

Cr Kas Di KPPN xxx

(jika saldo Kas di KPPN bernilai positif).

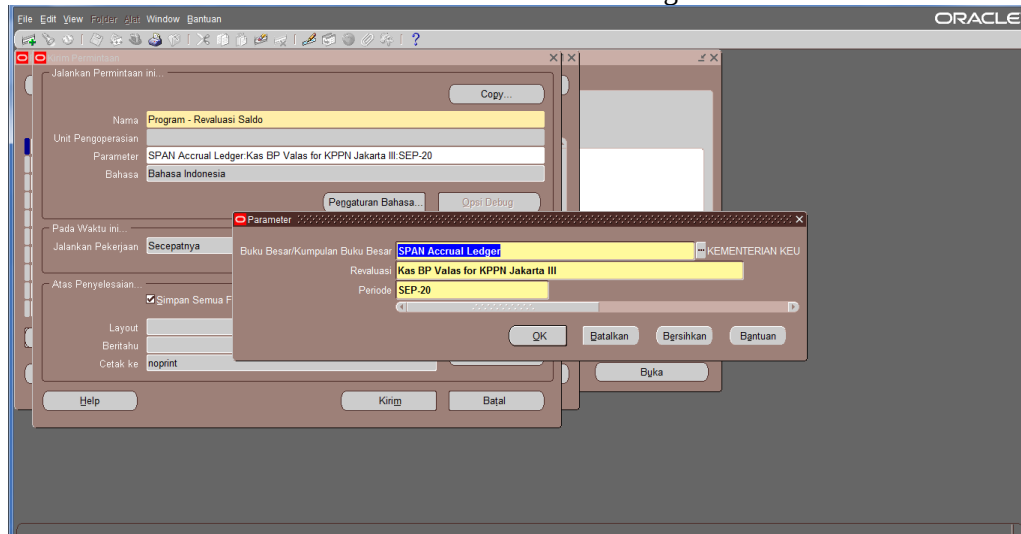
Selisih kurs yang terbentuk akibat revaluasi Kas di KPPN akan direklasifikasi sebagai Keuntungan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi / Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi dan diakui oleh Satuan Kerja Pengelola Transaksi Khusus pada KPPN Jakarta III.

b. Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran Valuta Asing

Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan melalui menu GL Vera User dengan mengirimkan permintaan → Program- Revaluasi Saldo → kemudian parameter revaluasi diisi dengan data sebagai berikut:

Buku Besar : SPAN Accrual Ledger
 Revaluasi : Kas BP Valas for KPPN Jakarta III
 Periode Revaluasi : September 2020
 Kemudian Ok dan Kirim.

Gambar. 2 SPAN Cash Ledger



Pada proses ini akan terbentuk jurnal yang menyesuaikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan. Kurs Tengah BI tanggal 30 September 2020 adalah Rp 14.918. setelah proses ini selesai maka dilakukan penyesuaia Kas di Bendahara Pengeluaran pada SPAN Cash Ledger yang pada saat revaluasi dilakukan masih dilakukan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Dari proses revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran didapatkan data sebagai berikut:

Tabel. 2 Hasil rekonsiliasi menunjukkan data saldo kas di bendahara pengeluaran (USD) sama.

SATKER	AKUN	SALDO AKHIR USD	KURS 30 -09-2020	PERHITUNGAN REVAL MANUAL	SEBELUM REVALUASI	JURNAL PENYESUAIAN
414593	111611	208.923,50	14.918	3.116.720.773	2.988.023.897	128.696.876
414607	111611	122.422,60	14.918	1.826.300.347	1.750.888.025	75.412.322
414613	111611	95.181,22	14.918	1.419.913.440	1.361.281.808	58.631.632
414622	111611	215.880,72	14.918	3.220.508.581	3.087.526.057	132.982.524
414638	111611	251.298,60	14.918	3.748.872.515	3.594.072.577	154.799.938
414644	111611	1.343.634,53	14.918	20.044.339.919	19.216.661.048	827.678.871
414650	111611	159.333,92			2.278.793.724	98.149.695

			14.918	2.376.943.419		
414669	111611	167.036,17	14.918	2.491.845.584	2.388.951.303	102.894.281
414681	111611	171.313,50	14.918	2.555.654.793	2.450.125.677	105.529.116
414690	111611	93.811,77	14.918	1.399.483.985	1.341.695.935	57.788.050
503121	111611	149.176,37	14.918	2.225.413.088	2.133.520.444	91.892.644
503135	111611	46.782,34	14.918	697.898.948	669.081.027	28.817.921
503142	111611	145.044,86	14.918	2.163.779.221	2.074.431.588	89.347.633
503143	111611	112.696,50	14.918	1.681.206.387	1.611.785.343	69.421.044
512684	111611	644.944,58	14.918	9.621.283.244	9.223.997.383	397.285.861
681816	111611	75.272,42	14.918	1.122.913.962	1.076.546.151	46.367.811
681820	111611	61.080,40	14.918	911.197.407	873.571.881	37.625.526
690349	111611	153.477,70	14.918	2.289.580.329	2.195.038.065	94.542.264

Sumber : data primer (diolah)

c. Revaluasi Utang Kepada Pihak Ketiga

Revaluasi Utang Kepada Pihak Ketiga dilakukan melalui menu GL Vera User dengan mengirimkan permintaan → Program- Revaluasi Saldo → kemudian parameter revaluasi diisi dengan data sebagai berikut:

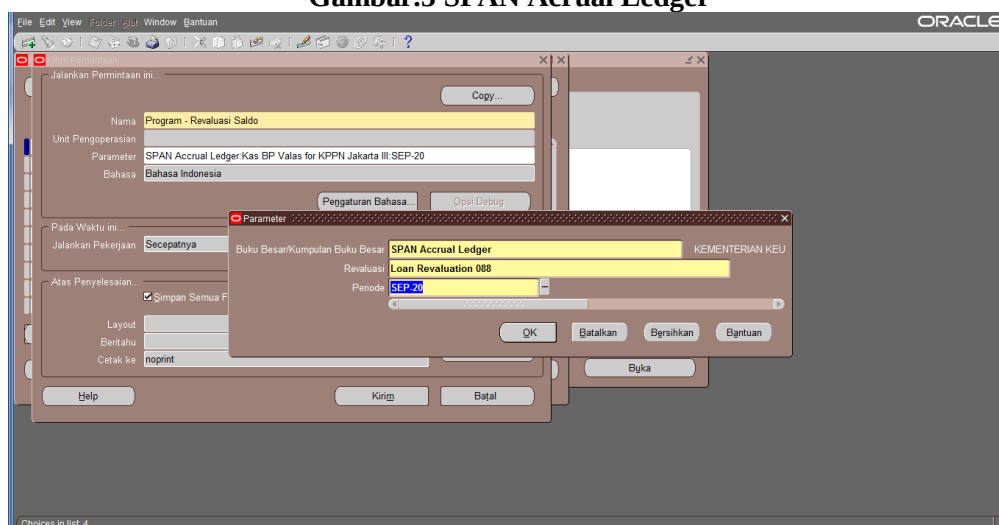
Buku Besar : SPAN Accrual Ledger

Revaluasi : Loan Revaluation 088

Periode Revaluasi : September 2020

Kemudian Ok dan Kirim.

Gambar.3 SPAN Accrual Ledger



Proses revaluasi utang kepada pihak ketiga akan terbentuk jurnal ketika terdapat utang kepada pihak ketiga dalam valuta asing. Berdasarkan data yang diperoreleh tidak ada

saldo Utang Kepada Pihak Ketiga pada KPPN Jakarta III, sehingga proses ini tidak terbentuk jurnal.

3. Tahap Pengujian

Tahapan Terakhir dalam proses revaluasi valuta asing adalah tahap pengujian untuk memastikan bahwa proses revaluasi telah dilakukan dengan benar.

Pengujian revaluasi Kas di KPPN dilakukan dengan membandingkan saldo kas di KPPN pada ledger kas dengan ledger akrual bernilai sama (biasanya setelah revaluasi bernilai 0). Pengujian pada revaluasi valuta asing pada Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan membandingkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah revaluasi dengan Perhitungan manual. Selain itu pengujian juga dilakukan untuk kesamaan saldo kas di Bendahara Pengeluaran pada ledger kas dan ledger akrual. Adapun data pengujian revaluasi kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel.3 Revaluasi utang kepada pihak ketiga, pengujian hanya dilakukan atas kesamaan saldo pada ledger kas dan ledger akrual.

SATKER	AKUN	SALDO AKHIR USD	KURS 30 - 09-2020	PERHITUNGAN REVAL MANUAL	HASIL REVAL	SELISIH
414593	111611	208.923,50	14.918	3.116.720.773	3.116.720.773	-
414607	111611	122.422,60	14.918	1.826.300.347	1.826.300.347	(0)
414613	111611	95.181,22	14.918	1.419.913.440	1.419.913.440	(0)
414622	111611	215.880,72	14.918	3.220.508.581	3.220.508.581	(0)
414638	111611	251.298,60	14.918	3.748.872.515	3.748.872.515	(0)
414644	111611	1.343.634,53	14.918	20.044.339.919	20.044.339.919	(0)
414650	111611	159.333,92	14.918	2.376.943.419	2.376.943.419	(0)
414669	111611	167.036,17	14.918	2.491.845.584	2.491.845.584	0
414681	111611	171.313,50	14.918	2.555.654.793	2.555.654.793	-
414690	111611	93.811,77	14.918	1.399.483.985	1.399.483.985	(0)
503121	111611	149.176,37	14.918	2.225.413.088	2.225.413.088	(0)
503135	111611	46.782,34	14.918	697.898.948	697.898.948	0
503142	111611	145.044,86	14.918	2.163.779.221	2.163.779.221	0
503143	111611	112.696,50	14.918	1.681.206.387	1.681.206.387	-
512684	111611	644.944,58	14.918	9.621.283.244	9.621.283.244	0
681816	111611	75.272,42	14.918	1.122.913.962	1.122.913.962	(0)
681820	111611	61.080,40	14.918	911.197.407	911.197.407	0
690349	111611	153.477,70	14.918	2.289.580.329	2.289.580.329	(0)

Sumber : data primer (diolah)

Sebagai dokumen pendukung dalam lampiran UAKBUN-D KPPN Jakarat III maka Setelah proses revaluasi valuta asing selesai dilakukan, KPPN Jakarat III menuangkannya dalam kertas kerja revaluasi dan membuat Berita Acara Jurnal atas jurnal manual yang dilakukan. Selain itu, KPPN Jakarta III juga menuangkan penjelasan revaluasi valuta asing dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada akhirnya untuk pos transaksi valuta asing pada pos Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Utang Kepada Pihak Ketiga disajikan dalam laporan keuangan dalam bentuk penjabaran dalam mata uang rupiah dapat dilakukan setelah proses revaluasi dilaksanakan sebagaimana disebutkan dalam PSAP no 1 yang menyebutkan bahwa “Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca”.

5. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan proses revaluasi valuta asing dalam penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-D) pada KPPN Jakarta III yang di jelaskan pada hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa proses yang terjadi sudah sesuai prosedur yang diterapkan oleh KPPN pusat. Proses revaluasi dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi SPAN pada 3 pos yaitu, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Utang Kepada Pihak Ketiga.

Daftar Pustaka

- Amallia, M. (2015). analisis sistem PNPB untuk meningkatkan efektifitas Kinerja pada KPPN Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(12), 1–16.
- Arieftiara, D., & Yanthi, M. D. (2017). Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing Terhadap Daya Informatif Laba. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 62–74. Retrieved from <http://jaki.ui.ac.id/index.php/home/article/view/607/607>
- Arinie Hembarwati. (2017). Dampak Keterlambatan Penyampaian Lpj Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Kppn Surabaya Ii. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas S U R A B A Y A*, 1–14.
- Aslichati lilik, H.I Bambang Prasetyo, dan P. I. (2011). *Metode Penelitian Sosial*.
- Dokman Marulitua Situmorang. (2019). The Effect Of Taxpayer Awarenes And Fiskus Service On Performance Of Tax Revenue With Taxpayer Compliance As Intervening Variables (Case Study of Individual Taxpayers registered at the Medan City KPP Pratama). *Management and Sustainable Development Journal*, 1(1), 26–37.
- Farida, M., & Darmawan, A. (2017). Pengaruh Risiko Inflasi, Risiko Suku Bunga, Risiko Valuta Asing, Dan Profitabilitas Terhadap Return Saham. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol, 50(1)*. Retrieved from www.indonesia-investments.com
- GULTOM, T. F., & SOELEHAN, A. (2019). Analisis nilai kurs valuta asing, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga sbi terhadap profitabilitas perusahaan. *Aan Soelehan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan, Indonesia, Bogor*, (October 2015).
- Heban, N., M, M., & Thahir, T. (2020). Analisis Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Makassar I. *AkMen*, 17(4), 539–547.
- Jessica P. S. Selly E. M. (2019). Analisis Dampak Harga Minyak Mentah Dunia, Tingkat Suku Bunga Dan Kurs Valuta Asing Terhadap Indeks Harga Saham Pertambangan Periode 2014 – 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Nuryana, F. (2015). Analisis Pemilihan Instrumen Investasi Bisnis Emas, Valuta Asing Dan Saham. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 196.

<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.481>

- Oflagi, J. G., Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2018). Analisis Aplikasi E-Rekon-Lk Terhadap Rekonsiliasi Laporan Keuangan Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(2), 693–704.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2012).
- Situmorang, D. M., & Hapsari, V. R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Belajar Akuntansi Di Daerah 3T. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 7(1), 77–84. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1406>
- Sulhan, M. (2011). Transaksi Valuta Asing (Al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 3(2). <https://doi.org/10.18860/iq.v3i2.257>
- Zulfah, I., Wahyuni, S., & Nurfaza, A. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan*, 3(November), 46–57.